

Diskursus Intoleransi Dalam Pilgub Jakarta Tahun 2017 di Media Indonesia

(Studi Wacana Kritis pada *Kompas.com*, *Republika.co.id*, dan *Tempo.co*)

Luky Maulana Firmansyah – 071511533020

Ilmu Komunikasi, Universitas Airlangga

Email: lukymaulana36@gmail.com

ABSTRAK

Fokus dari penelitian ini adalah mengungkap secara kritis diskursus intoleransi dalam Pilkada Jakarta 2017 yang diwacanakan oleh media *online Kompas.com*, *Republika.co.id*, dan *Tempo.co* melalui pelbagai pemberitaannya. Penelitian ini berangkat dari persoalan menguatnya wacana intoleransi yang menjadi wacana dominan dalam momen kontestasi politik tersebut. Adapun penelitian ini merumuskan permasalahannya sebagai berikut: 1) Bagaimana diskursus mengenai intoleransi diartikulasikan melalui pelbagai berita yang ada pada portal berita *Tempo.co*, *Republika.co.id*, dan *Kompas.com* ? 2) Apa makna terselubung dari diskursus intoleransi tersebut?

Studi ini menggunakan metode analisis wacana kritis milik Norman Fairclough yang berguna untuk membaca hubungan yang konstitutif dari praktik pewacanaan intoleransi yang diartikulasikan oleh ketiga media dengan praktik sosio-kultural yang menjadi konteks wacana. Peneliti juga memakai ekonomi-politik media Marxis untuk melihat kepentingan ekonomi dari media dalam studi ini yang merupakan bagian dari konglomerasi media di Indonesia dan teori aparatus negara ideologis Althusser sebagai pisau analisa tambahan untuk membaca bagaimana posisi media dalam mewacanakan narasi ideologis negara.

Wacana intoleransi pada studi ini tersebar pada empat tematik wacana yaitu wacana aksi bela Islam, wacana penistaan agama, wacana kepemimpinan Muslim, dan wacana pasca-Ahok. Hasil dari penelitian ini antara lain wacana intoleransi ini merupakan satu bentuk wacana politik yang menjadi ruang bagi pertarungan kekuasaan dengan bergerak secara sentrifugal, dan terdapat tiga dimensi intoleransi yaitu intoleransi antar agama, intoleransi intra agama, dan intoleransi negara.

Keyword: *diskursus intoleransi, pilgub jakarta tahun 2017, ekonomi-politik media, critical discourse analysis, aparatus negara ideologis*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan studi yang membaca secara kritis diskursus mengenai intoleransi pada portal berita *online* yaitu *tempo.co*, *kompas.com*, dan *republika.co.id* selama rentang waktu Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 melalui pelbagai teks beritanya. Studi yang menyoal diskursus secara kritis bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan dialektis antara bahasa dengan praktik sosial (Fairclough N. , 1995). Intoleransi yang dimaksud oleh peneliti adalah sebuah kontradiksi dalam konflik yang mengarah pada agama. Intoleransi dapat diartikan berasal dari keyakinan dari sistem kepercayaan yang lebih tinggi dari yang lain yang menyebabkan diskriminasi dan penghancuran yang disengaja (Ismail, 2009).

Dipilihnya kajian mengenai intoleransi dalam Pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017 karena intoleransi menjadi wacana utama yang dominan dalam kontestasi politik tersebut. Dalam pandangan peneliti, diskursus intoleransi ini mengakar secara masif dengan melibatkan

pelbagai kelompok agama yang menjadi aktor dalam praktik diskursif. Jakarta yang merupakan Ibu Kota memiliki pengaruh yang besar dalam menyedot perhatian dengan kekuatan media massa yang terpusat. Dalam hal ini media juga turut melakukan praktik pewacanaan terkait intoleransi dalam perebutan kekuasaan di Jakarta.

Animo besar dalam melihat kontestasi kekuasaan lokal di Jakarta sebetulnya telah dimulai pada Pilkada Jakarta 2012. Pada periode tersebut, media massa memainkan peranan penting dalam menyebutkan bahwa Pilkada Jakarta 2012 merupakan pemilu paling kontroversial daripada pemilihan lainnya sejak pemilu 1999, dengan menyebutkan hasilnya sebagai “kemenangan demokrasi” atas intoleransi etnis-agama (Miichi, 2012). Dalam periode itu pula, artikulasi intoleransi lambat-lambat mulai memasuki arena pertarungan politik lokal di Jakarta yang dapat dilihat dalam ketegangan etnis-agama.

Dalam pengamatan Miichi (2012), Jakarta sebagai ibu kota Republik memberikan perhatian yang serius terkait keharmonisan etnis-agama akibat masifnya kampanye negatif yang dilakukan terhadap pasangan calon Joko Widodo yang Jawa dan dinilai “kurang Islami” dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang Kristen-Tionghoa dengan lawannya yaitu Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli yang mengklaim bahwa mereka adalah Muslim Betawi “asli”.

Pada gilirannya, peneliti berasumsi bagaimana Pilkada pada khususnya memang kerap kali menjadi arena bagi masuknya praktik intoleransi etnik-agama, terutama Jakarta yang secara historis pernah terjadi seperti pada Pilkada Jakarta 2012. Selain itu, urgensi Pilkada Jakarta 2017 sebagai persoalan nasional juga menjadi relevan, dikarenakan pertarungan kekuasaan di Jakarta dapat menjadi titik sentral untuk menyorot perhatian nasional.

Di sisi lain, peneliti merasa perlu untuk melihat diskursus intoleransi dan agama baik secara internal maupun relasi keduanya. Hal dikarenakan Foucault berpendapat bahwa penelitian diskursus memiliki relasi analogi, oposisi, atau saling mempengaruhi diskursus lainnya (Foucault, 1972). Pertama, mengenai intoleransi yang secara sosio-historis merupakan persoalan yang panjang di Indonesia. Di era Orde Baru misalnya, dalam studinya Daniel Dhakidae mengungkapkan pelbagai konflik agama seperti penutupan gereja secara paksa, dirusak, dan dibakar sementara 55 buah masjid mengalami persoalan yang sama (Dhakidae, 2003). Sementara dalam pengamatan Abuza (2007) pasca-reformasi gejala intoleransi menguat dengan bentuk yaitu kasus kekerasan dalam terorisme.

Di sisi lain, agama sendiri di Indonesia telah menjadi sebuah diskursus. Menurut Dhakidae (2003) di era Orde Baru agama menjadi kontrol dengan diorganisasikan secara tertentu untuk menghindari kekuasaan dan bahaya yang bisa ditimbulkan. Kehadiran ICMI misalnya, organisasi cendekiawan Muslim yang mengambil keuntungan politik inklusif dari

Orde Baru dimana institusi agama dilibatkan dengan militer dan birokrat (Dhakidae, 2003). Lebih lanjut, reformasi memberikan corak yang berbeda dalam menangani agama, dengan basis desentralisasi kuasa dan demokratisasi yang lentur. Oleh karena itu, Hefner (2000) berpendapat bahwa keleluasan ini direspon dengan Islam dengan misi membangkitkan Islam sebagai agama yang memiliki budaya yang demokratis dan masyarakat sipil yang kuat.

Hal ini kemudian berkonsekuensi pada masifnya perkembangan Islam pasca kejatuhan Orde Baru. NU sebagai Islam tradisional dan Muhammadiyah sebagai Islam modern yang merupakan organisasi arus utama (*mainstream*) Islam yang menganut asas moderat memang telah menciptakan banyak sejarah di Indonesia. Namun, pasca-reformasi kedua ormas Islam tersebut mendapat tantangan dari kehadiran Islam yang bercorak radikal. Kemunculan Islam radikal pasca Orde Baru ini merupakan kekuatan yang pada umumnya terpinggirkan dari posisi negara – dalam artian mereka memiliki posisi yang kaku terhadap gagasan negara Islam berdasarkan Syariah dan antipati menuju proses demokrasi yang dipadang sebagai Barat dan asing (Hadiz, 2010).

Diskursus intoleransi muncul saat beredarnya video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang merupakan Gubernur DKI Jakarta Petahana yang berkunjung ke Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Dalam pidatonya, Ahok membahas persoalan agama: salah satu surat dalam kitab suci agama Islam yang menurutnya sering dijadikan alat politik untuk tidak memilih pemimpin yang berlatarbelakang non-Muslim. Karena pidatonya ini serta videonya yang menyebar secara masif di media daring Ahok dilaporkan atas kasus penistaan agama.

Berbagai respons muncul dari tindakan Ahok tersebut. Yang paling kentara adalah demonstrasi Aksi Bela Islam: aksi berjilid yang dimotori oleh pelbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti FPI (Front Pembela Islam), GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dan ormas Islam lainnya yang berwatak radikal, militan, dan fundamentalis. Aksi bela Islam itu memiliki serangkaian aksi yang dimulai pertama pada 14 Oktober 2016 dan yang paling mengundang massa banyak untuk melakukan demonstrasi adalah aksi pada 4 November 2016 dan 2 Desember 2016 yang menciptakan kegaduhan dan kerusuhan di DKI Jakarta.

Secara historis, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelumnya pernah menemui persoalan serupa yaitu target dari intoleransi. Laporan dari Setara Institute menyebutkan bahwa pada tahun 2014 Front Pembela Islam (FPI) menolak kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yaitu Ahok karena beridentitaskan non-muslim. Penolakan itu kemudian disebut memiliki pendekatan yang baru yaitu politik intoleransi (Naipospos & Hailili, 2015).

Isu intoleransi agama ini memang menjadi satu diskursus yang signifikan dalam Pilgub Jakarta 2017. Ahok menjadi satu-satunya orang beragama non-Muslim dari tiga pasangan calon yang berkompetisi. Wacana untuk memilih Muslim sebagai pemimpin umat Islam juga menjadi salah satu narasi yang dominan. Sementara pasca selesainya Pilkada DKI Jakarta 2017 terdapat pelbagai isu diantaranya kemenangan umat Islam, peran sentimen agama, dan tancapan intoleransi yang kuat, dan aksi politik Islam radikal untuk menjatuhkan Ahok.

Urgensi dari peneliti dalam melihat wacana intoleransi ini adalah kekuatannya untuk berubah secara gradual dalam pelbagai bentuk diskursus yang lain yang dimulai dari wacana penistaan agama. Hal ini kemudian juga berpengaruh antara konstelasi teks dalam persoalan intoleransi yang saling berkontradiksi.

Dalam studi ini peneliti memilih tiga portal berita online yang menjadi sumber dalam basis analisis pelbagai teks beritanya: *Tempo.co*, *Kompas.com*, dan *Republika.co.id*. Dipilihnya ketiga media tersebut mula-mula memiliki dinamika sejarah panjang dalam dunia pers Indonesia serta mengalami konvergensi dari media cetak ke portal berita online.

Tempo.co merupakan portal berita online yang muncul pada tahun 1996 sebagai bentuk pengembangan dari *Tempo Interaktif* yang hadir pada tahun 1995 – yang beritikad untuk mencari alternatif baru dan melakukan konvergensi dengan memanfaatkan internet. Pada mulanya Tempo merupakan sebuah media cetak yang berformat majalah mingguan. Tempo didirikan pada 1971 saat Orde Baru masih balita (Steele, 2007). Media tersebut pernah mengalami pembredelan oleh pemerintah Orde Baru di tahun 1982 dan 1994 karena seringkali mengkritik pemerintah. Tempo memiliki reputasi juga sebagai media *nonconfessional* yang berorientasi sekular (Steele, 2007).

Media berikutnya adalah Kompas yang didirikan tahun 1965 oleh sejumlah jurnalis Katolik keturunan Cina dan Jawa. Media tersebut lahir atas inisiatif partai Katolik – muncul menyuarakan suara Katolik di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia periode 1960-an – dan berlanjut sampai tahun 1971 seiring dengan upaya pemerintah mengikis loyalitas sektarian (Hill, 2007). Media ini melenggang karena sikap kehati-hatiannya dalam menyikapi persoalan zaman terutama ketika Orde Baru. Benedict Anderson bahkan mengomentari gaya penulisan yang sarat “kebosanan tak terperikan” dan melabeli Kompas sebagai koran Orde Baru sejati (Hill, 2007).

Di bawah arahan Jakoeb Otama, pemimpin utama Kompas, dibentuklah *Kompas Cyber Media* pada tahun 1998 untuk membentuk media online (www.kompas.com) (Leksono, 2007). Kompas sendiri memiliki jargon “Kompas memasyarakat” dengan meletakkan urat nadinya kehidupannya berada dalam kata kunci, *compassion*. Kata tersebut

kemudian diterjemahkan oleh Jakob Oetama dengan istilah *humanisme transedental* (Pour, 2007).

Media yang ketiga yaitu *Republika*: satu-satunya surat kabar yang bernafaskan Islam – yang diterbitkan ICMI pada tahun 1993 – dan menjadi corong kepentingan kaum Islam yang mencerminkan kepentingan kaum Islam pada perkembangan politik masa itu (Keller, 2009). Pers bernuansa Islam tersebut menjadi media pertama yang hadir di internet – *Republika Online* yang tayang perdana di tahun 1994 (Margianto & Syaefullah, 2014).

Untuk sementara, peneliti berasumsi bahwa diskursus intoleransi yang hadir selama Pilgub Jakarta 2017 dipengaruhi oleh praktik pewacanaan intoleransi yang kompleks dilakukan oleh elite politik, tokoh dan/atau organisasi masyarakat, masyarakat sipil, dan negara. Sehingga gerak dialektis tersebut membawa pengaruh pada pemberitaan media massa – yang dimana media memiliki posisi pemberitaan masing-masing. Penelitian yang bersifat eksploratif ini akan menggunakan metode *critical discourse analysis* Norman Fairclough yang menganalisis bagaimana praktik diskursif media menciptakan bentuk politik baru dengan memperhitungkan praktik diskursif dalam kekuatan sosial (Jorgensen & Phillips, 2002).

PEMBAHASAN

Pada bagian analisis, peneliti menemukan bahwa diskursus intoleransi ini teraksentuasi pada empat tema wacana yaitu aksi bela Islam, penistaan agama, kepemimpinan Muslim, dan pasca-Ahok. Analisis peneliti akan didasarkan pada metode wacana kritis Norman Fairclough yang berfungsi sebagai pisau analisa untuk membongkar konstelasi penanda dalam teks yang secara resiprokal bersinggungan dengan praktik sosio-kultural. Ada tiga dimensi dalam membedah wacana intoleransi pada ketiga media dalam studi ini yaitu dimensi teks yang terkait bagaimana logika pemberitaan, dimensi praktik wacana yaitu produksi dan konsumsi teks, dan praktik sosio-kultural yang menyoal persoalan ideologi dan kekuasaan yang mendeterminasi praktik pewacanaan media.

Analisis pertama peneliti adalah membaca konstelasi wacana intoleransi melalui penanda aksi bela Islam. Aksi bela Islam ini merupakan suatu aksi demonstrasi yang memiliki pelbagai tuntutan mulai dari memproses hukum Basuki Tjahjaja Purnama (Ahok), manajemen Islam dari negara, dan lain sebagainya. Serial aksi bela Islam ini harus dilihat sebagai suatu praksis yang mempertemukan pelbagai kekuatan sosial dalam satu agenda massa. Rentetan aksi ini juga mampu menyedot perhatian masyarakat Islam secara besar untuk berbondong-bondong mengikuti gerakan tersebut, dengan massa yang paling besar pada gerakan 411 dan 212. Kekuatan gerakan ini mampu menyedot perhatian pemerintah, yang disimbolkan melalui Presiden Joko Widodo yang ikut menghadiri gerakan tersebut yaitu pada aksi bela Islam 212.

Ekses yang dihasilkan dari serangkaian aksi tersebut adalah adanya ketegangan yang terjadi khususnya pada kelompok Islam secara internal, serta ketegangan dengan pemerintah.

Kompas dalam mewacanakan aksi bela Islam menyebut aksi tersebut sebagai gerakan yang mengguncang stabilitas nasional dan upaya makar terhadap pemerintahan Jokowi. Mengenai stabilitas nasional, hal ini dapat dibaca pada teks pemberitaan Kompas yaitu *Kaleidoskop 2016: Pernyataan Ahok, Aksi Damai, dan Pemufakatan Makar*. Dalam teks tersebut, Jokowi menempuh langkah dengan bertemu dengan Polri untuk tidak ragu dalam menindak kelompok yang merusak keragaman dan persatuan Indonesia dan dengan para ulama pimpinan 17 ormas Islam dimana Jokowi berterima kasih karena telah menjaga keutuhan NKRI dan ketenteraman masyarakat.

Secara historis, teks stabilitas nasional ini merupakan salah satu bentuk propaganda Orde Baru. Arsitektur politik Orde Baru Ali Moertopo melihat pentingnya memutar balik partisipasi politik untuk stabilitas politik dan pembangunan, ketimbang memobilisasi massa seperti pada zaman Soekarno. Pandangan ini juga diafirmasi oleh ekonom Orde Baru yaitu Sarbini Sumawinata yang melihat urgensi stabilitas politik sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi (Bourchier & Hadiz, 2003). Sementara dalam konteks ini, stabilitas nasional dimaknai sebagai upaya menjaga keberagaman dari masalah multikulturalisme utamanya intoleransi agama.

Sementara itu dalam pewacanaan mengenai makar, peneliti membaca bahwa pewacanaan Kompas bersifat interteks dengan artikel yang ditulis oleh Allan Nairn melalui media *online* Tirto.id yaitu pada berita *Panglima TNI Tegaskan Tak Bisa Diajak Kudeta Jokowi*. Allan Nairn (2017) melalui tulisannya *Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanya Dalih untuk Makar* menyebutkan bahwa misi utama dalam aksi bela Islam selain tuntutan kasus penistaan agama Ahok, juga mengandung upaya makar terhadap Jokowi untuk menghabisi kekuasannya akibat langkah Jokowi yang dinilai hendak mengadili kasus HAM para jenderal melalui simposium 65. Pewacanaan Kompas ini serupa dengan Tirto.id dalam kemunculan penanda yang sama yaitu militer, Islam, dan Jokowi.

Jika menilik teks lain, relasi Islam dengan militer ini bersifat historis. FPI yang merupakan organisasi Islam dengan corak konservatif ini pernah memiliki hubungan dengan Djadja Suparman, yang dipandang sebagai jenderal “sekuler” yang solid sebelum jatuhnya Soeharto. Relasi itu terjadi pada peristiwa konflik di Maluku yang juga melibatkan kelompok Kristen (Mietzner, 2006). Dalam konteks ini, relasi itu terjadi kembali dengan penanda Kristen yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dari dua pewacanaan Kompas tersebut, peneliti

membaca bahwa Kompas berpihak pada narasi yang diproduksi oleh negara untuk membangun legitimasi politik di hadapan negara.

Media yang kedua yaitu Republika mewacanakan aksi bela Islam sebagai kemajuan Islam dan repesifitas negara. Narasi mengenai kemajuan Islam ini dapat dibaca dalam artikulasi pada berita *Aksi 4 November Bukti Kemajuan Pengorganisasian Kelompok Islam* dan *Aksi 212 Buktikan Kedewasaan dan Kesantunan Umat Islam*. Kemajuan Islam itu ditafsirkan sebagai kedewasaan umat Muslim dalam berdemokrasi yang ditunjukkan dengan perasaan cinta damai serta sensitifitas dalam merespon kasus penistaan agama. “Keberhasilan” gerakan ini bahkan bergeser sampai pada ranah generalisasi kekerasan simbolik, dimana isu anti-Ahok digunakan untuk merasionalisasi seluruh kelompok China-Kristen di Indonesia (Osman & Waikar, 2018).

Selanjutnya mengenai repesifitas negara, artikulasi wacana media ini berusaha membangun ketegangan antara kelompok Muslim dengan pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada pemberitaan Republika pada berita *Tuding Ada yang Tunggangi Aksi Bela Islam III, Pemerintah Dinilai Panik* dan *Tudingan Aksi 4 November Didanai Aktor Politik Lukai Umat Islam*. Peneliti membaca bahwa artikulasi Republika ini memunculkan intoleransi negara dengan berlaku secara dominatif dominatif dalam merespon ekses yang dihasilkan dalam serial aksi bela Islam, yang dalam teks Republika kelompok Islam ini menjadi target untuk digebuk dan disingkirkan.

Ketegangan antara negara dengan Islam ini memang kerap kali terjadi. Di era Orde Baru, negara sebetulnya pernah mengeluarkan kebijakan dalam pengelolaan hubungan negara yang bernama *tri kerukunan*, yang berfungsi sebagai reorientasi dan panduan dalam kehidupan beragama agar tidak mengganggu kerukunan sosial. Dalam *tri kerukunan* tersebut, yang terpenting adalah tercapainya hubungan antara negara dan agama, khususnya Islam. Kebijakan ini sendiri muncul akibat sepuluh tahun relasi antagonistik antara negara dengan Islam (1960an sampai 1970an) (Porter D. J., 2002).

Dalam hal ini, penulis melihat bahwa pewacanaan Republika memiliki posisi keberpihakan yang konsisten dalam menyuarakan protes kelompok Islam atas kasus penistaan agama serta menyediakan ruang untuk membantah tudingan negatif terkait gerakan sosial tersebut. Jika melihat nilai yang dimiliki oleh Republika sebagai media Islam, dengan mengambil jarak dengan pemerintah yang dapat dilihat dari orientasi pemberitaan. Dalam hal ini, Republika memang cenderung memiliki orientasi pemberitaan yang kontra terhadap kebijakan pemerintah jika dirasa hal itu merugikan umat Islam (Abar, 2005).

Sementara Tempo dalam memandang aksi bela Islam mengartikulasikan sebuah wacana mengenai fragmentasi kelompok Islam dan adanya perebutan klaim atas Pancasila. Wacana yang pertama dapat dilihat pada pemberitaan *Aksi Bela Islam Dinilai Tak Jelas, Busyro: Buat Apa* yang memuat narasi Muhammadiyah yang memandang telah ada manipulasi dalam aksi bela Islam sebagai upaya makar terhadap pemerintahan Jokowi dan pada pemberitaan *Ketua PBNU Tahu Siapa Penggerak dan Tujuan Aksi 112* yang menarasikan sikap NU (Nahdlatul Ulama) yang berbicara bahwa aksi bela Islam merupakan pertarungan ideologi antara Islam moderat dengan Islam radikal.

Dalam konteks pembicaraan antara NU dan Muhammadiyah, Hefner (2000) berpendapat kedua organisasi tersebut mendominasi ruang demokrasi pasca kejatuhan rezim Soeharto serta dapat didefinisikan sebagai Islam sipil yang mempromosikan nilai demokrasi, toleransi, sikap saling menghormati, dan menghargai pluralitas pemikiran. Peneliti menilai persoalan ini menjadi logis jika NU dan Muhammadiyah memandang insignififikasi aksi bela Islam karena berkontradiksi secara internal dengan nilai-nilai yang mereka yakini.

Mengenai perebutan klaim atas Pancasila, hal ini dapat dilihat pada pemberitaan Tempo dalam teks *Rizieq: Aksi Bela Islam Bukan Gerakan Anti Pancasila*. Peneliti melihat bahwa teks ini cukup beralasan hadir, mula-mula karena klaim atas siapa yang paling Pancasilais dari kedua kubu, antara Islam radikal yang diwakilkan oleh FPI atau Megawati yang merepresentasikan partai yang berideologi nasionalisme. PDI Perjuangan dikenal sebagai salah satu kekuatan nasionalis yang berkomitmen mempertahankan NKRI dengan menempatkan Pancasila sebagai asas, watak, dan ciri partai dengan penerapan nasionalisme “wong cilik” (Kaligis, 2014).

Kendati dalam konteks saat ini FPI yang disimbolkan Habib Rizieq berbicara bahwa Pancasila merupakan ideologi yang final dalam berbangsa dan negara, artikulasi Tempo dalam mempertemukan kembali FPI dengan diskursus Pancasila membangkitkan ingatan mengenai permintaan FPI kepada DPR/MPR untuk mengembalikan Pancasila sesuai Piagam Jakarta. Dalam salah satu arsipnya, Tempo memberikan rincian mengenai demonstrasi FPI yang terjadi pada tahun 2003 yang menuntut penambahan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yaitu “dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang ditambahkan kedalam UUD 45. FPI beralasan pengembalian tersebut bermaksud untuk meredakan pertentangan ideologi dan keotentikan sejarah bangsa Indonesia (Tempo, 2003).

Alasan untuk merubah konstitusi yang bersifat ideologis dalam penerapan syariat Islam, justru FPI melihat bahwa konstitusi Indonesia sebagai sesuatu yang amoral dan dianggap sebagai hukum yang cacat. Padahal, maksud terselubung dari FPI adalah untuk bisa

memiliki keleluasan dalam mendorong inisiatif untuk melakukan tindak kekerasan terhadap apa yang diidentifikasi sebagai tempat maksiat seperti klub, bar, judi, dan rumah pelacuran – serta kelompok agama minoritas yang dianggap menyimpang (Facal, 2019).

Tema wacana kedua yang dianalisis oleh peneliti adalah wacana kasus penistaan agama Ahok. Kompas dalam mewacanakan isu penodaan agama mengartikulasikan bahwa kasus tersebut mengandung politisasi agama dan mereduksi demokrasi. Pada pewacanaan yang pertama, hal ini dapat dilihat pada teks berita *Alasan Sejumlah Pihak Mau Jadi Penjamin agar Ahok Tak Ditahan* yang menarasikan bahwa politisasi itu muncul akibat gerakan politik yang hadir di tengah Pilkada Jakarta 2017 dan putusan Polri yang dianggap sebagai dalih atas stabilitas politik.

Alibi mengenai stabilitas politik ini memang lekat dengan pasal penistaan agama. Mahkamah Konstitusi dalam penerapan hukum penistaan agama mengatakan bahwa ada alasan seperti “ketertiban publik” dan “nilai-nilai agama” yang harus dipenuhi serta negara memiliki hak untuk campur tangan untuk mengkriminalisasi tindakan penistaan yang bisa menyebabkan konflik horizontal, kerusuhan sosial, dan permusuhan dalam masyarakat (Amnesty International, 2014). Dengan demikian, Kompas dalam hal ini juga mengkonstruksi bahwa aspek politis dalam kasus Ahok bukan semata-mara perkara gerakan aksi bela Islam, melainkan kebijakan politis negara yang lebih mengupayakan stabilitas politik.

Narasi mengenai reduksi demokrasi dapat ditemukan kembali pada berita *LBH Jakarta Bela Ahok soal Kasus Dugaan Penodaan Agama*. Dalam teks tersebut menyebutkan bahwa Ahok dalam kasus ini telah menjadi korban dari penggunaan pasal-anti demokrasi yakni Pasal 156a tentang penodaan agama apalagi ditambah konteks masa pilkada yang harusnya demokratis. Disamping itu, negara juga dikonstruksi gagal melindungi demokrasi karena belum menaati rekomendasi dari MK untuk merevisi UU Penodaan Agama. Teks yang lain memperlihatkan penistaan agama sebagai reduksi demokrasi juga muncul akibat tekanan massa dan fatwa MUI. Narasi ini mengingatkan pada wacana mengenai pengajuan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pasal penodaan agama untuk dicabut, kendati putusan pengadilan pada tahun 2010 mengatakan bahwa justru pasal penodaan agama perlu dijaga untuk memelihara “ketertiban umum” (Human Rights Watch, 2013).

Berlanjut pada *Republika* yang mengartikulasikan wacana bahwa kasus penistaan agama Ahok ini memiliki urgensi pada penegakan hukum dan menjadi stimulus atas menguatnya ujaran kebencian. Pembahasan mengenai hukum penodaan agama ini terletak pada relevansinya pada masa aktual, seperti dalam pemberitaan *Menag: Pasal Penistaan Agama Masih Relevan*. Dalam berita tersebut, terjadi pengujian mengenai UU Penodaan

Agama dalam posisinya sebagai pencegah konflik sosial berdasarkan agama dan oknum yang hendak menistakan agama. Artinya, penistaan agama tidak hanya dimaknai sebagai penegakan hukum namun perlu adanya upaya preventif.

Teks tersebut mengindikasikan jelas bahwa Republika tunduk pada wacana mengenai penistaan agama yang mengeksklusi Islam sebagai kelompok agama yang patut dilindungi atas UU Penodaan Agama jika melihat konteks historis pembuatan hukum tersebut. Ditambah lagi, argumentasi yang diungkapkan oleh kelompok yang mendukung hukum penistaan agama untuk mencegah konflik agama dan melestarikan harmoni sosial merupakan argumen yang bersifat umum dan seringkali digunakan (Crouch, 2012).

Artikulasi kepentingan Islam dalam Republika juga termuat dalam narasi mengenai meningkatnya ujaran kebencian. Hal ini dapat dilihat dalam teks pada berita *Maraknya Ujaran Kebencian Dampak dari Kasus Penistaan Agama* yang mengkonstruksi pandangan bahwa maraknya ujaran kebencian ini akibat kasus penistaan agama Ahok. Di sisi lain, pemerintah dianggap tidak serius dalam menampung aspirasi Islam yang pada gilirannya akan berdampak pada stabilitas nasional. Ujaran kebencian berbasis agama dapat dimaknai sebagai ucapan yang mengandung hasutan kebencian atas dasar agama yang dilontarkan terhadap korban dengan identitas agama tertentu (Howard, 2018). Sementara itu O'Reilly dan Vrielink menilai bahwa sensitivitas agama muncul atas karakteristik agama yang dapat diperdebatkan serta sering menjadi pusat perdebatan politik dan sosial (Howard, 2018).

Jika mengacu pendapat tersebut, sensitivitas ini yang kemudian terjadi pada umat Islam mengenai perdebatan tafsir Al-Maidah ayat 51 dengan umat Islam menanggapi bahwa Ahok telah memelintir arti dari ayat tersebut serta digunakan sebagai kebohongan. Perdebatan itu lebih mengarah kepada aspek sosial-politik karena berada pada konteks Pilkada Jakarta 2017 dan berdampak sosial terhadap umat Islam di Indonesia.

Sementara Tempo memandang bahwa kasus penistaan agama Ahok ini mengandung tiga persoalan yang pelik yaitu intervensi negara, persoalan HAM, dan Politik SARA. Mengenai intervensi negara Tempo mengalami kebingungan, jika melihat pada pemberitaan *Pengamat: Pengadilan Penistaan Agama untuk Menjegal Ahok* yang mensyaratkan intervensi negara harus diletakkan sebagai aktus kekuasaan yang melindungi demokrasi dari pengadilan jalanan yang anarkis, berbanding terbalik pada pemberitaan *Komnas HAM: Hindari isu SARA dalam Pilkada DKI* yang mengkonstruksi pandangan bahwa proses hukum Ahok diharapkan bisa berlangsung independen, imparial, dan harus otonom yang berarti tidak ada intervensi dari penguasa.

Lebih lanjut, persoalan HAM dapat ditemukan pada berita *Jokowi Dianggap Langgar HAM dalam Kasus Ahok, ini Alasannya*. Peneliti melihat bahwa agenda liberal muncul dalam pewacanaan Tempo mengenai HAM. Pewacanaan ini bersinggungan dengan wacana Tempo dengan corak media liberal akibat pengaruh dari Goenawan Muhammad. Sebagaimana diketahui, Goenawan Muhammad memiliki jejak sebagai aktivis liberal yang pernah disokong oleh CCF (Congress of Cultural Freedom) sebuah organisasi anti-komunis yang menghimpun intelektual liberal di Eropa (Steele, 2007). Bersama dengan Arief Budiman, Goenawan menandatangani Manifesto Kebudayaan pada 1963 yang oleh David Hill dipandang bahwa anak-anak muda Manikebuis memainkan peranan penting dalam membentuk pola pikir “Barat” (Steele, 2007).

Tempo juga memandang bahwa ada persoalan SARA dalam kasus Ahok yang berujung dengan intoleransi. Menurut peneliti, Tempo jelas membela Ahok dalam kasus penodaan agama. Rekayasa politik SARA ini merupakan wacana turunan dari rezim Orde Baru. Ketika Orde Baru hendak jatuh yang ditandai dengan krisis yang melanda, kalangan Muslim konservatif bersatu untuk menyalahkan Soeharto serta membuat retorika kebencian anti-Cina dan anti-Kristen (Hefner R. W., 2000). Pada konteks ini, rekayasa kebencian berbasis SARA terhadap Ahok sebagai simbol Cina-Kristen dikonstruksi oleh Tempo sebagai upaya untuk mendulang keuntungan politik dalam Pilkada. Artinya bahwa, artikulasi intoleransi itu dimaksudkan untuk menciptakan kekuatan dalam politik praktis untuk tidak memilih Ahok sebagai pemimpin non-muslim.

Selanjutnya yaitu tema diskursus ketiga dalam diskursus intoleransi adalah kepemimpinan Muslim. Wacana ini menyeruak akibat pertarungan dalam politik praktis yang membawa gagasan pada keharusan untuk memilih pemimpin Muslim di Pilkada Jakarta 2017. Pada Kompas, media tersebut mewacanakan bahwa gagasan tersebut memuat strategi politik elektoral dan terdapat residu negatif intoleransi. Strategi politik elektoral yang dimaksud Kompas terletak pada pemberitaan *Pandangan Sandiaga terhadap Kelompok Intoleran yang Mendukungnya* yang menarasikan bahwa ada “dukungan politik berbasis terhadap kesamaan agama” yang mengarah kepada pasangan cagub Anies Baswedan dan cawagub Sandiaga Uno.

Serta juga dapat dilihat dalam pemberitaan Kompas pada *Siapa yang Diuntungkan dari Isu Intoleransi pada Pilkada DKI* yang memuat dua pandangan terkait kelompok mana yang diuntungkan akibat maraknya isu intoleransi. Pendapat pertama berbicara bahwa pasangan Anies-Sandiaga diuntungkan sebab Basuki Tjahaja (Ahok) yang merupakan lawan politiknya sedang menghadapi kasus penodaan agama dan seringkali menjadi target dari politik identitas.

Pendapat kedua yaitu berbicara bahwa yang mendulang keuntungan isu intoleransi ini adalah kelompok non-parlemen tertentu yang terus terlibat dalam proses politik di Indonesia.

Rekayasa intoleransi dalam proses kontestasi politik di Indonesia ini merupakan salah satu bentuk strategi politik dalam mendulang keuntungan elektoral. Alasannya, Pilkada yang menjadi struktur kesempatan politik kerap kali menunjukkan pentingnya momen tersebut bagi sentimen intoleransi keagamaan untuk mobilisasi elektoral. Selain itu, momen Pilkada juga bisa dilihat sebagai variabel yang mendukung pergeseran relasi kuasa yang kerap kali terjadi kekerasan terhadap kelompok minoritas (Ahnaf, Maarif, Asyhari-Afwan, & Afdillah, 2015).

Dalam sejarah kontestasi politik, persoalan kepemimpinan Muslim memang menjadi suatu ihwal yang kerap kali muncul. Jika menilik jejak historis, wacana ini menyeruak masif ketika Orde Baru, saat Abdurrahman Wahid yang dipanggil Gus Dur, pemimpin NU berbicara bahwa ada kesempatan non-Muslim untuk menjadi Presiden di Indonesia. Gus Dur mengatakan pemimpin itu adalah Benny Moerdani, seorang jenderal katolik, yang digadang-gadang akan menggantikan Soeharto (Syarif, 2018).

Sementara dalam menyoal residu negatif intoleransi, pada pemberitaan *Pilkada DKI Dikhawatirkan Timbulkan Intoleransi di Lingkungan Sekolah*, Kompas menyoroti masifnya isu agama yang dinilai akan mengkhawatirkan guru dan orang tua serta berpotensi mengulangi kekerasan 1998. Peneliti membaca bahwa perpecahan 1998 yang dimaksudkan oleh Kompas adalah kerusuhan yang terjadi akibat kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Jakarta yang menyebabkan ratusan orang terbunuh, lusinan wanita Tionghoa diperkosa, dan pemusnahan massal properti milik Tionghoa yang merupakan insiden brutal (Bertrand, 2004). Kekerasan ini disinyalir terjadi akibat provokasi kelompok Islam konservatif yang dimobilisasi oleh Jenderal Prabowo dan pasukannya untuk menyiapkan serangan dengan skala penuh terhadap orang Tionghoa dan Kristen (Hefner R. W., 2000).

Kemudian Republika dalam merespon wacana kepemimpinan Muslim mengatakan bahwa ide tersebut merupakan konsekuensi dari persoalan marginalisasi ekonomi, instruksi ormas Islam, dan propaganda politik. Hal ini dapat dimulai dengan melihat pemberitaan Republika yaitu *Narasi Intoleransi di Tengah Kesenjangan*. Teks tersebut memuat kebijakan Ahok yang melakukan pengusuran digambarkan sebagai “kesewenang-wenangan Ahok” dan sikapnya yang “berdalih bangunan-bangunan tersebut harus dibongkar karena berdiri di atas tanah negara”. Dengan mengambil sudut pandang dua korban hasil pengusuran, Republika menarasikan bahwa permasalahan intoleransi dalam tuduhan terhadap masyarakat yang makin intoleran karena antipati terhadap Ahok sebagai bentuk kebencian terhadap kelompok

minoritas adalah keliru. Justru, perasaan antipati itu muncul karena kebijakan Ahok yang memperlebar ketimpangan sosial di Ibu Kota.

Pasalnya, pewacanaan Republika tersebut khas pemikiran ICMI yang berusaha untuk membangun perjuangan politik bagi umat Islam di Indonesia utamanya masalah ekonomi, sosial, dan politik. Hefner (2000) menangkap bahwa perhatian utama birokrat elite ICMI adalah masalah ekonomi Indonesia yang didominasi oleh kapitalis Cina yang biang keladinya ada pada Soeharto karena lebih suka bekerja dengan orang Cina ketimbang pribumi kelas menengah yang sebagian besar Muslim. Praktik pewacanaan seperti ini linear dengan gaya Republika yang orientasi pemberitaannya mengkritik kebijakan pemerintah yang menguntungkan kelompok kuat seperti konglomerat dan merugikan umat Islam secara ekonomi-politik (Abar, 2005).

Berlanjut pada instruksi ormas Islam, Republika mewacanakan bahwa ada peran dari ormas Islam dalam mendukung gagasan kepemimpinan Muslim seperti dalam pemberitaan *Muhammadiyah Minta Hormati Yang Memilih Cagub DKI Berdasarkan Agama* yang mengartikulasikan pandangan bahwa memilih pemimpin sesama Muslim bukan persoalan SARA dan radikal. Dalam pandangan Syarif (2018) ada dua diskursus yang membentuk legitimasi untuk memilih pemimpin Muslim utamanya presiden yaitu inspirasi dari Piagam Jakarta yang mengatur bahwa Presiden Indonesia harus dari seorang Muslim yang sebetulnya telah dihapus dari konstitusi pada 18 Agustus 1945 dan pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi negara Islam (*Darul Islam*) karena mayoritas penduduknya adalah Muslim.

Argumentasi lain dari Woodward (2001) yang mengamati kondisi pemilu 1999, ada peristiwa yang terjadi sebelum pemilihan yaitu instruksi dari Dewan Dakwah Indonesia yang mewajibkan semua Muslim untuk memilih partai Islam, dan jika tidak memilih mereka dianggap “meninggalkan jalan Islam”. Instruksi tersebut dalam hemat Woodward merupakan satu bentuk politik identitas yang paling murni karena kemampuan yg hebat dari sekelompok kecil partai politik yang mampu mendefinisikan jutaan Muslim di Indonesia (Woodward, 2001).

Narasi pewacanaan Republika yang ketiga yaitu relasi kepemimpinan Muslim dengan intoleransi sebagai propaganda politik dengan korban umat Islam yang dituduh intoleran dan radikal. Intoleransi ini bersifat destruktif karena menimbulkan permusuhan sesama Muslim akibat perbedaan sikap politik. Hal ini diwacanakan oleh Republika dalam berita *Bertemu GP Ansor, Ketua MPR Bahas Tuduhan Intoleransi di Jakarta*. Narasi dalam berita tersebut menyebutkan adanya hubungan masyarakat yang memanas akibat pertarungan politik yang

menyeret agama. Historisitas tuduhan radikal itu bisa dimaksudkan pada kelompok Islam yang memang berintensi untuk mewujudkan negara Islam dan hukum syariah. Hal ini tergambarkan pada peristiwa Komando Jihad di tahun 1970-an dan awal 1980-an yang dipropagandakan oleh Orde Baru sebagai organisasi akar-rumput yang mencapai kekuasaan dengan kekerasan dalam mendirikan negara Islam (Hadiz V. R., 2011).

Berlanjut pada Tempo yang mengartikulasikan bahwa ide kepemimpinan Muslim ini merupakan petanda atas menguatnya radikalisme dan politik identitas. Narasi menguatnya radikalisme dapat dilacak pada pemberitaan Tempo yaitu *Jokowi dan Ketua Muhammadiyah Bertemu, Ini yang Dibahas*. Teks tersebut mengatakan bahwa ada persoalan intoleransi yang masuk dalam ranah politik di Pilkada Jakarta 2017 dengan karakter intoleransi ini muncul karena adanya radikalisme yang membawa gagasan kepemimpinan Muslim. Pasalnya, narasi tersebut merupakan wacana yang konsisten hadir mengenai peran radikalisme dalam menimbulkan intoleransi keagamaan. Abuza (2007) berpendapat bahwa kejatuhan rezim otoriter Orde Baru memberi kesempatan bagi Islam radikal untuk berperilaku “tidak beradab”, dengan menyebar kebencian dan intoleransi untuk mengoperasikan kekerasan.

Peneliti merasa bahwa penolakan Tempo secara terang-terangan dalam menolak radikalisme lebih kepada agenda liberal Tempo yang lebih berpihak kepada kelompok Islam yang lebih lentur, toleran, dan menjunjung tinggi kebebasan beragama. Selain itu historisitas Tempo sebagai media yang sepemikiran dengan Jaringan Islam Liberal, yang memiliki figur yaitu Ulil Abshar-Abdalla, yang mengatakan bahwa artikel Tempo ketika Orde Baru mendapat banyak dukungan dari kelompok Islam karena sejalan dengan desakan untuk menciptakan demokrasi dan pluralisme (Steele, 2007).

Sementara dalam pewacanaan bahwa ide kepemimpinan Muslim merupakan produk dari politik identitas yang hadir dalam pemberitaan *NU: Pisahkan Agama dengan Pilkada DKI Jakarta* yang menarasikan bahwa ada politik identitas yang provokatif yang membuat masyarakat Jakarta tidak memilih paslon Gubernur tertentu. Agnes Heller dalam (Habibi, 2017) memandang politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokusnya adalah perbedaan yang memiliki ancaman terhadap rasisme dan mendukung praktik kekerasan dan intoleransi. Dengan demikian, peneliti melihat bahwa Tempo menolak gagasan kepemimpinan Muslim karena politik identitas yang rasis, eksploitatif terhadap perbedaan, dan intoleran. Sikap Tempo tersebut juga terulang pada pembelaan Tempo yang menyebut bahwa penolakan gagasan kepemimpinan Muslim ini berbicara dalam konteks menghindari SARA yang melawan konstitusi. Dalam hal ini, ideologi Tempo yang menjunjung pluralisme menjadi logis ketika media ini menolak gagasan kepemimpinan Muslim akibat politik identitas.

Terakhir, tematik wacana yang keempat yaitu pasca-Ahok. Peneliti berpendapat bahwa pasca-Ahok ini merupakan kondisi wacana yang menggambarkan dua persoalan yaitu hasil Pilkada Jakarta 2017 dan vonis hukum Ahok atas kasus penodaan agama selama 2 tahun. Dalam pasca-Ahok, artikulasi Kompas berfokus pada kemenangan radikalisme yang menggunakan politisasi agama dalam hasil Pilkada Jakarta 2017. Pada pemberitaan *Kekalahan Ahok dan Kemenangan Anies dalam Sorotan Media Asing* terdapat sorotan dari Kompas dalam melihat kelompok Islam garis keras yang berhasil menguasai Jakarta dan berintensi untuk mewujudkan agenda ultrakonservatif seperti kebijakan syariah. Kelompok ini kemudian dimanfaatkan oleh politisi seperti Anies Baswedan yang mengeruk keuntungan elektoral.

Menurut peneliti, pewacanaan tersebut hendak menyinggung keberadaan FPI. Dalam pengamatan Wilson (2018) FPI memang kerap kali mengamplifikasi kekuasaan dan patronase dari strategi berkuasa para elite politik lokal serta dapat menjadi makelar kekuasaan untuk menciptakan konflik dengan pihak-pihak tertentu dengan dalih menjaga “tertib sosial” tertentu. Dalam hal ini, FPI telah berhasil menguatkan daya tawarnya terhadap para elite politik dengan berhasil menciptakan aksi berjilid atas nama Islam dan mengkampanyekan kepemimpinan Muslim yang kemudian dimanfaatkan oleh Anies.

Selain itu, Kompas juga mewacanakan bahwa vonis hukum Ahok ini merupakan keputusan hukum yang destruktif. Melalui pemberitaan *Badan-Badan Dunia Prihatin terhadap Vonis Penjara Ahok*, Kompas menarasikan pandangan yang mempertanyakan keberadaan UU Penodaan Agama sampai desakan untuk mengkaji ulang. Hal ini diakibatkan pasal tersebut bisa merusak reputasi Indonesia yang dikenal sebagai “negara yang memiliki tradisi toleransi dan pluralisme”. Selain itu, alasan yang digunakan Kompas yaitu karena bisa merusak kebebasan beragama dan berpendapat yang berimbas pada aspek perlindungan HAM. Selain itu, dengan vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan kepada Ahok, kasus ini menambah daftar panjang kasus penodaan agama sepanjang tahun 1965-2017 sebanyak 97 yang ironisnya 89 kasus terjadi pasca-reformasi.

Pasalnya, wacana untuk mengkaji ulang keberadaan UU Penodaan Agama atau bahkan menghapusnya mengalami tantangan yang cukup kompleks. Peneliti telah membahas sebelumnya bahwa pasal ini dilindungi secara penuh oleh kekuasaan negara yang selalu berdalih atas nama stabilitas dan keamanan yang juga didukung eksistensi oleh kelompok Islam merepresentasikan kuasa mayoritas di Indonesia. Kompas sebenarnya pernah mewacanakan pasal penodaan agama dengan mengatakan bahwa dukungan untuk pasal tersebut tidak datang dari kelompok Islam radikal seperti FPI namun ada juga dukungan dari kelompok moderat seperti NU dan Muhammadiyah (Wijayanto, 2017). Sementara dalam pengajuan untuk

menghapuskan hukum Penodaan Agama, hanya datang dari segelintir kelompok agama minoritas atau kelompok Islam yang mengidentifikasi diri sebagai Islam liberal atau progresif (Crouch, 2012).

Berlanjut pada *Republika* dalam merespon wacana pasca-Ahok, mengartikulasikan bahwa ada kemenangan Pancasila di Pilkada Jakarta 2017 dan ketidakadilan dalam vonis Ahok. Untuk yang pertama dapat dilacak dalam pemberitaan *Survei: Kemenangan Anies-Sandi Bukan karena Islam Radikal*. Teks tersebut menarasikan bahwa pendukung Anies-Sandiagi memiliki preferensi ideologis Demokrasi Pancasila. Peneliti melihat bahwa pewacanaan *Republika* mengenai kemenangan Pancasila ini karena sikap media tersebut yang defensif dan apologetik terutama terhadap isu kemenangan Islam radikal. Selain itu, isu yang dilempar oleh media asing juga membuat pewacanaan *Republika* dibumbui dengan elemen nasionalis. Hal ini berkorelasi dengan studi yang dilakukan oleh Rahman (2017) yang membaca pewacanaan *Republika* dalam menyesuaikan konteks jihad di Indonesia yang kerap kali dipersepsi negatif sebagai Islam teroris yang kemudian merubah makna jihad itu sebagai proses negosiasi antara identitas nasional dengan identitas Islam.

Narasi ketidakadilan dalam pewacanaan *Republika* menyoal mengenai proses hukum Ahok yang dinilai cacat karena Jaksa Penuntut umum yang tidak independen akibat berlatar belakang politik, sehingga kasus Ahok dinilai sarat kepentingan. Pada berita *Vonis Penjara 2 Tahun untuk Ahok, Bukti JPU tak Independen* itu juga disebutkan bahwa ada ketidakseimbangan antara tuntutan JPU dengan pidana penjara satu tahun, yang pada akhirnya diputuskan oleh Hakim sebanyak dua tahun. Dalam berita itu, *Republika* juga mewacanakan karena JPU ini tidak independen dan sarat kepentingan maka negara harus hadir yaitu Kejaksaan RI untuk memberikan sanksi kepada tim JPU sesuai perundang-undangan. Pewacanaan tersebut juga menyeret Presiden Jokowi untuk meninjau kembali Jaksa Agung bernama HM Prasetyo tersebut. Hal ini semakin menegaskan sikap *Republika* yang sedari awal selalu mewacanakan ketegangan umat Islam dengan negara.

Terakhir, pewacanaan *Tempo* mengenai pasca-Ahok memiliki intonasi pada persoalan kepemimpinan Ahok yang banal dan politik vonis Ahok. Pewacanaan yang pertama dapat ditemui pada pemberitaan *Penyebab Ahok Kalah versi Dua Peneliti Australia*. *Tempo* mengatakan bahwa Ahok disebut memiliki persoalan dengan “gaya komunikasi yang sering diperdebatkan dan menimbulkan masalah” dan kebijakan pengurusan yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang. Selain itu, ada keterlibatan kelompok konservatif seperti FPI yang masuk mewakili aspirasi masyarakat, kendati banyak orang yang benci dengan ormas Islam tersebut. Namun FPI menjadi kelompok yang ada di kampung-kampung dan kerap

mendampingi kaum miskin. Seperti yang peneliti jelaskan sebelumnya dengan mengutip Ian Wilson (2018) FPI memang seringkali menarik perhatian kelas pekerja dan kaum miskin kota, juga mampu mengelola ketegangan kelas dan kecemburuan sosial-ekonomi yang khususnya pada konteks perebutan ruang di Jakarta yang kerap menjadi subteks dan dengan begitu menjadi dalih kebencian yang kuat bagi kelompok tersebut.

Pewacanaan Tempo lainnya yaitu mengenai politik vonis Ahok ini berkaitan dengan bagaimana aspek politik mempengaruhi proses penjatuhan hukuman pidana. Pada berita *Haris Azhar: Soal Ahok dan HTI, Permainan Politik Keseimbangan*, kasus Ahok menjadi politis karena sehari sebelumnya ada wacana dari negara yang akan membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia karena dianggap “merongrong Pancasila dan NKRI”. Dua hal yang muncul bersamaan ini disebut Tempo sebagai “permainan politik keseimbangan”. Artinya disini Tempo menilai bahwa kasus Ahok sudah bergeser dari ranah hukum ke ranah yang sifatnya politis karena ada politik negara di sekitarnya.

Atas nama Pancasila dan NKRI yang menjadi alibi negara dalam membubarkan HTI ini dalam hemat peneliti merupakan satu bentuk represifitas negara. Pasalnya, negara memang seringkali berlaku represif terhadap organisasi yang dicap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Soekarno misalnya yang menangkap dan mengeksekusi pimpinan ormas Islam radikal Darul Islam yaitu Kartosuwirjo pada tahun 1962. Ormas tersebut berintensi untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Soekarno juga pernah melarang Masyumi untuk berorganisasi dan menangkap pimpinannya Mohammad Natsir karena terlibat pemberontakan agama (Abuza, 2007).

Dari kesemua empat tematik wacana intoleransi yaitu aksi bela Islam, kasus penistaan agama, kepemimpinan Muslim, dan pasca-Ahok serta pewacanaan dan sikap keberpihakan dari ketiga media dalam studi ini yaitu Kompas, Republika, dan Tempo – peneliti melihat bahwa diskursus intoleransi secara makro ini merupakan artikulasi dari pertarungan wacana politik. Wacana politik sendiri itu merupakan artikulasi sebuah perspektif dengan reproduksi dan kontestasi dari kekuasaan politik yang melibatkan aktor politik (Fairclough & Fairclough, 2012). Adapun batasan dari diskursus intoleransi sebagai diskursus politik ini yaitu pada momen kontestasi Pilkada Jakarta 2017.

Peneliti juga mengamati bahwa pertarungan dalam diskursus politik mengenai intoleransi ini menciptakan tiga bentuk intoleransi. Pertama, intoleransi antar-agama yang terjadi dalam relasi kuasa antara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan kelompok aksi bela Islam. Intoleransi ini beresonansi secara nasional dengan membentuk legitimasi politik bahwa Ahok mewakili kelompok China-Kristen berhadapan dengan kelompok Muslim Indonesia, yang

pada sisi historis memang kerap kali mengalami konflik. Kedua, intoleransi intra-agama khususnya Islam yang menunjukkan relasi antara ormas Islam dan masyarakat Muslim di Indonesia. Karakter intoleransi ini dapat dilihat pada perbedaan pendapat antara ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah yang menolak aksi bela Islam atau yang terjadi sesama Muslim Indonesia ketika mendukung gagasan kepemimpinan Muslim dengan dicap radikal dan intoleran.

Ketiga yaitu intoleransi negara, ketika rezim Jokowi juga turut mempraktikkan intoleransi, seperti misalnya mengecap kelompok Muslim dengan tuduhan radikal dan intoleran dalam aksi bela Islam atau mendukung gagasan kepemimpinan Muslim. Oleh karena itu, peneliti juga berpendapat bahwa gerak diskursus intoleransi ini bersifat sentrifugal, yang menjauh dari kekuasaan negara, ormas Islam, dan masyarakat pada level akar rumput (*grass-roots*).

Setelah melihat bagaimana artikulasi wacana intoleransi dari ketiga media dalam studi ini yaitu Kompas, Republika, dan Tempo, peneliti juga melihat bagaimana media tersebut menjadi aparatus ideologis negara yang mengkonstruksi pandangan dominan negara. Hal ini sesuai dengan konsep Althusser (2006) yang mengatakan bahwa aparatus Komunikasi terletak pada peranan media massa, yang dalam hal ini media massa dengan bentuk daring (*online*). Dalam konsep Althusser, media massa dipercaya sebagai institusi yang mampu menyublimasi ideologi, mengkonstruksi wacana, dan menginterpelasi kesadaran subjek atau pembaca informasi dari media massa. Oleh karena itu, kerja aparatus negara ideologis ini bersifat privat.

Dari kesemua praktik pewacanaan yang menyediakan ruang bagi masuknya narasi ideologis negara, peneliti melihat bahwa ketiga media ini memusatkan narasi negara pada tema wacana tertentu. Kompas dan Tempo misalnya yang secara dominan memusatkan narasi negara pada pewacanaan mengenai diskursus aksi bela Islam. Hal ini menjadi logis ketika melihat konteks dari Kompas yang telah peneliti bahas sebelumnya mengidap satu sindrom *islamophobia* karena memiliki sejarah sebagai media katolik minoritas yang menganggap kuat Islam sebagai mayoritas. Oleh karena itu, dalam pewacanaan mengenai aksi bela Islam peneliti berpendapat bahwa media ini kontra dan lebih banyak mengkritik gerakan tersebut melalui narasi negara.

Hal ini juga berlanjut pada Tempo yang dikenal sebagai media sekuler, kendati Tempo dalam sejarahnya kerap kali berusaha untuk mengakomodasi kepentingan Islam. Namun tampaknya, narasi sekuler Tempo dalam pewacanaan terhadap aksi bela Islam mencapai titik temu dengan karakter rezim Jokowi. Sementara Republika mengkonstruksi narasi negara utamanya berkaitan dengan posisi negara yang melindungi gagasan kepemimpinan Muslim.

Jauh dibalik itu, terdapat konteks ICMI yang mempengaruhi pewacanaan Republika yang dalam sejarahnya, ketika era pasca-reformasi berupaya untuk melakukan Islamisasi di Indonesia dengan mendukung gagasan kepemimpinan Muslim dengan pada saat itu menolak kepemimpinan Megawati. Maka, dalam hal ini peneliti melihat bahwa diambilnya aparatus ideologis negara sebagai narasumber oleh ketiga media ini menunjukkan sebuah kompromi politik antara pewacanaan media dengan narasi ideologis negara yang disesuaikan dengan agenda politik wacana masing-masing media.

Analisis terakhir dari peneliti adalah pasca berkuat dari dimensi politik yang menyoal diskursus dan relasi kuasa serta kerja media sebagai aparatus negara, peneliti menganalisis juga media sebagai subjek yang dalam operasinya dikendalikan dengan ekonomi determinisme. Pendekatan ekonomi-politik dalam studi ini melihat bahwa praktik ketiga media tersebut mencirikan media sebagai institusi kapitalis. Kompas dan Tempo misalnya yang mengkomodifikasi jumlah pembaca berita mengenai intoleransi untuk dipertukarkan dengan iklan yang menghasilkan keuntungan. Sementara Republika mengintegrasikan sisi produksinya dengan memunculkan lini bisnis perusahaan yang lain dengan praktik spasialisasi.

Praktik tersebut berfungsi untuk mengakumulasi keuntungan dan memperbesar modal di tengah tantangan proses digitalisasi. Terlebih, industri media memiliki kecenderungan untuk mengkonsentrasikan usaha bisnisnya seperti *Kompas.com*, *Republika.co.id*, dan *Tempo.co* yang merupakan bagian bisnis dari kerajaan bisnis yang lebih besar. Di sisi lain, ketiga media dalam studi ini juga mendapatkan keuntungan politik dengan memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik melalui ideologi dominan mereka.

KESIMPULAN

Peneliti berkesimpulan bahwa yang menjadi jawaban besar dari rumusan masalah mengenai diskursus intoleransi ini adalah intoleransi dapat dimaknai sebagai wacana politik yang berkaitan dengan pertarungan kekuasaan. Pertarungan yang melibatkan pelbagai aktor sosial ini semata-mata bukan persoalan kalah-menang di Pilkada, melainkan juga terdapat politik negara yang mempengaruhi intonasi dari wacana intoleransi. Artinya, diskursus intoleransi ini memiliki gerak sentrifugal yang dimulai dari politik negara, pertarungan aktor sosial, dan masyarakat pada level akar-rumput. Pada akhirnya, wacana politik tentang intoleransi di Pilkada Jakarta 2017 ini dalam pembacaan peneliti memunculkan tiga bentuk intoleransi. Pertama, intoleransi antar agama yang melibatkan ketegangan atas sentimen anti-Ahok, kemudian intoleransi intra agama yang melibatkan polarisasi ormas Islam dan umat Islam di Indonesia, dan intoleransi negara yang secara represif berupaya meredam radikalisme yang menjadi penyebab utama masifnya intoleransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abar, A. Z. (2005). Masa Depan Jurnalisme Republika: Pertarungan Realitas dalam Media Berita Islam. Dalam I. S. Ibrahim (Penyunt.), *Media dan Citra Muslim dari Spiritualitas untuk Berperang menuju Spiritualitas untuk Berdialog* (hal. 439-452). Yogyakarta: Jalasutra.
- Abuza, Z. (2007). *Political Islam and Violence in Indonesia*. London and New York: Routledge.
- Abuza, Z. (2007). *Political Islam and Violence in Indonesia*. London and New York: Routledge.
- Ahnaf, M. I., Maarif, S., Asyhari-Afwan, B., & Afdillah, M. (2015). *Politik Lokal dan Konflik Keagamaan Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik dalam Konflik Keagamaan di Sampang, Bekasi, dan Sampang*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies / CRCS.
- Althusser, L. (2006). *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Amnesty International. (2014). *Prosecuting Beliefs: Indonesia's Blasphemy Laws*. London: Amnesty International Ltd.
- Bertrand, J. (2004). *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourchier, D., & Hadiz, V. R. (2003). *Indonesian Politics and Society*. London: RoutledgeCurzon.
- Crouch, M. A. (2012). Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law. *Asian Journal of Comparative Law*, 1-46.
- Dhakidae, D. (2003). *Cendekiawan Dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Facal, G. (2019). Islamic Defenders Front Militia (Front Pembela Islam) and its Impact on Growing Religious Intolerance in Indonesia. *Trans Regional and National Studies of Southeast Asia*, 1-22.
- Fairclough, I., & Fairclough, N. (2012). *Political Discourse Analysis A method for advanced students*. London and New York: Routledge.
- Fairclough, N. (1995). *Media Discourse*. London: Arnold.
- Foucault, M. (1972). *The Archeology Of Knowledge and The Discourse On Language*. New York: Pantheon Books.
- Habibi, M. (2017). Analisis Politik Identitas di Indonesia. *Working Paper*, 1-22.
- Hadiz, V. (2010). Political Islam in Post-Authoritarian Indonesia. *Crise Working Paper*, 1-37.
- Hadiz, V. R. (2011). Indonesian Political Islam: Capitalist Development and the Legacies of the Cold War. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 3-38.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam Muslim and Democratization in Indonesia*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam Muslim and Democratization in Indonesia*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Hill, D. (2007). *The Press in New Order Indonesia*. (G. L. Soerjoatmodjo, Trans.) Jakarta: Equinox Publishing.
- Howard, E. (2018). *Freedom of Expression and Religious Hate Speech in Europe*. New York: Routledge.
- Human Rights Watch. (2013). *Atas Nama Agama Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*. United States of America: Human Rights Watch. Diambil kembali dari Human Rights Watch.
- Ismail, H. (Ed.). (2009). *Siding And Acting Intolerantly: Report of Freedom of Religion/Belief in Indonesia 2008*. Jakarta: SETARA Institute.

- Jorgensen, M., & Phillips, L. (2002). *Discourse Analysis as Theory and Method*. London: Routledge.
- Kaligis, R. A. (2014). *Marhaen dan Wong Cilik Membedah Wacana dan Praktik Nasionalisme bagi Rakyat Kecil dari PNI sampai PDI Perjuangan*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Keller, A. (2009). *Tantangan Dari Dalam: Otonomi Redaksi 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Leksono, N. (2007). Surat Kabar Di Tengah Era Baru Media & Jurnalistik. In S. Sularto (Ed.), *Kompas Dari Belakang Ke Depan: Menulis dari Dalam* (pp. 261-286). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Margianto, J., & Syaefullah, A. (2014). *Media Online: Antara Pembaca, Laba, Dan Etika*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.
- Mietzner, M. (2006). *The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance*. Washington: East-West Center Washington.
- Miichi, K. (2012). The Role of Religion and Ethnicity in Jakarta's 2012 Gubernatorial Election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 55-83.
- Naipospos, B. T., & Hailili. (2015). *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2014*. Jakarta: Setara Institute.
- Nairn, A. (2017, April 19). *Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanya Dalih untuk Makar*. Diambil kembali dari tirto.id: <https://tirto.id/investigasi-allan-nairn-ahok-hanyalah-dalih-untuk-makar-cm2X>
- Osman, M. M., & Waikar, P. (2018). Fear and Loathing: Uncivil Islamism and Indonesia's Anti-Ahok Movement. *Cornell University Press*, 89-109.
- Porter, D. J. (2002). *Managing Politics and Islam in Indonesia*. London and New York: RoutledgeCurzon.
- Pour, J. (2007). Kearifan Mengintip Ke Belakang Keberanian Menatap Ke Depan. In S. Sularto (Ed.), *Kompas Dari Belakang Ke Depan: Menulis Dari Dalam* (pp. 119-138). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahman, T. (2017). Contextualizing jihad and mainstream Muslim identity in Indonesia: the case of Republika Online. *Asian Journal of Communication*, 1-18.
- Steele, J. (2007). *Wars Within: Pergulatan Tempo, Majalah Berita Sejak Zaman Orde Baru*. (A. Zulkifli, Trans.) Jakarta: Dian Rakyat.
- Syarif, M. I. (2018). Political Discrimination Against Non-Muslim in Contemporary Indonesia. *International Conference on Law and Justice* (pp. 69-72). Atlantis Press.
- Tempo. (2003, Desember 31). *FPI Minta DPR/MPR Kembalikan Pancasila Sesuai Piagam Jakarta*. Diambil kembali dari Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/37730/fpi-minta-dprmpr-kembalikan-pancasila-sesuai-piagam-jakarta/full&view=ok>
- Wijayanto. (2017). Fearing the majority: Catholic media in Muslim Indonesia. *Media Asia*, 33-39.
- Wilson, I. D. (2018). *Politik Jatah Preman Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru*. (M. J. Suryana, Penerj.) Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Woodward, M. R. (2001). Indonesia, Islam, and the Prospect for Democracy. *SAIS Review*, 29-37.